



Dukungan Pendanaan Untuk Peningkatan Kualitas Ekosistem Penelitian Sosial - Humaniora

Bahan Direktur Jenderal Anggaran
Pada Kegiatan *Focus Group Discussion* - SMERU

Jakarta, 02 Maret 2021



Outline

1. ARAH DAN KEBIJAKAN APBN TA 2021

2. DASAR HUKUM TERKAIT RISET

3. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENELITIAN

4. TANTANGAN PENGEMBANGAN RISET DI INDONESIA



1

ARAH DAN KEBIJAKAN APBN 2021



Asumsi Dasar dan Sasaran Pembangunan 2021



Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali menuju *trajectory* pertumbuhan jangka menengah, meskipun masih penuh ketidakpastian

	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0
Inflasi (% , yoy)	3,0
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.600
Tingkat Bunga SBN-10 th (%)	7,29
Harga Minyak (US\$/barrel)	45
Lifting Minyak (rbph)	705
Lifting Gas (rbsmph)	1.007

Sasaran & Indikator Pembangunan

Upaya meningkatkan kesejahteraan a.l ditunjukkan dengan kesepakatan untuk memperbaiki indeks Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan dalam APBN 2021

	APBN
Tk. Pengangguran (%)	7,7 – 9,1
Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7
Gini Ratio (indeks)	0,377 – 0,379
Indeks Pembangunan Manusia	72,78 – 72,95
Nilai Tukar Petani	102-104
Nilai Tukar Nelayan	102-104



Arah Kebijakan APBN 2021

- 1. Perekonomian global dan domestik di tahun 2021 masih akan diliputi ketidakpastian.** Pengendalian pandemi dan ketersediaan vaksin akan menentukan percepatan pemulihan ekonomi
- 2. Defisit APBN 2021 5,70 persen PDB** ditujukan untuk **menjaga momentum pertumbuhan ekonomi**, serta menghindari *opportunity loss* dalam mendorong pencapaian target pembangunan nasional
- 3. APBN 2021 akan melanjutkan kebijakan *countercyclical* yang ekspansif-konsolidatif** dengan memperhatikan fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian dan mendorong pengelolaan fiskal yang *prudent* dan *sustainable*
- 4. Prioritas pembangunan nasional akan difokuskan** pada bidang Kesehatan, Pendidikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ketahanan Pangan, Perlindungan Sosial, Infrastruktur, dan Pariwisata.





2

DASAR HUKUM TERKAIT RISET



DASAR HUKUM

PERPRES 38 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS RISET NASIONAL TAHUN 2020-2024

PMK NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN → **KEBIJAKAN TAX DEDUCTION**

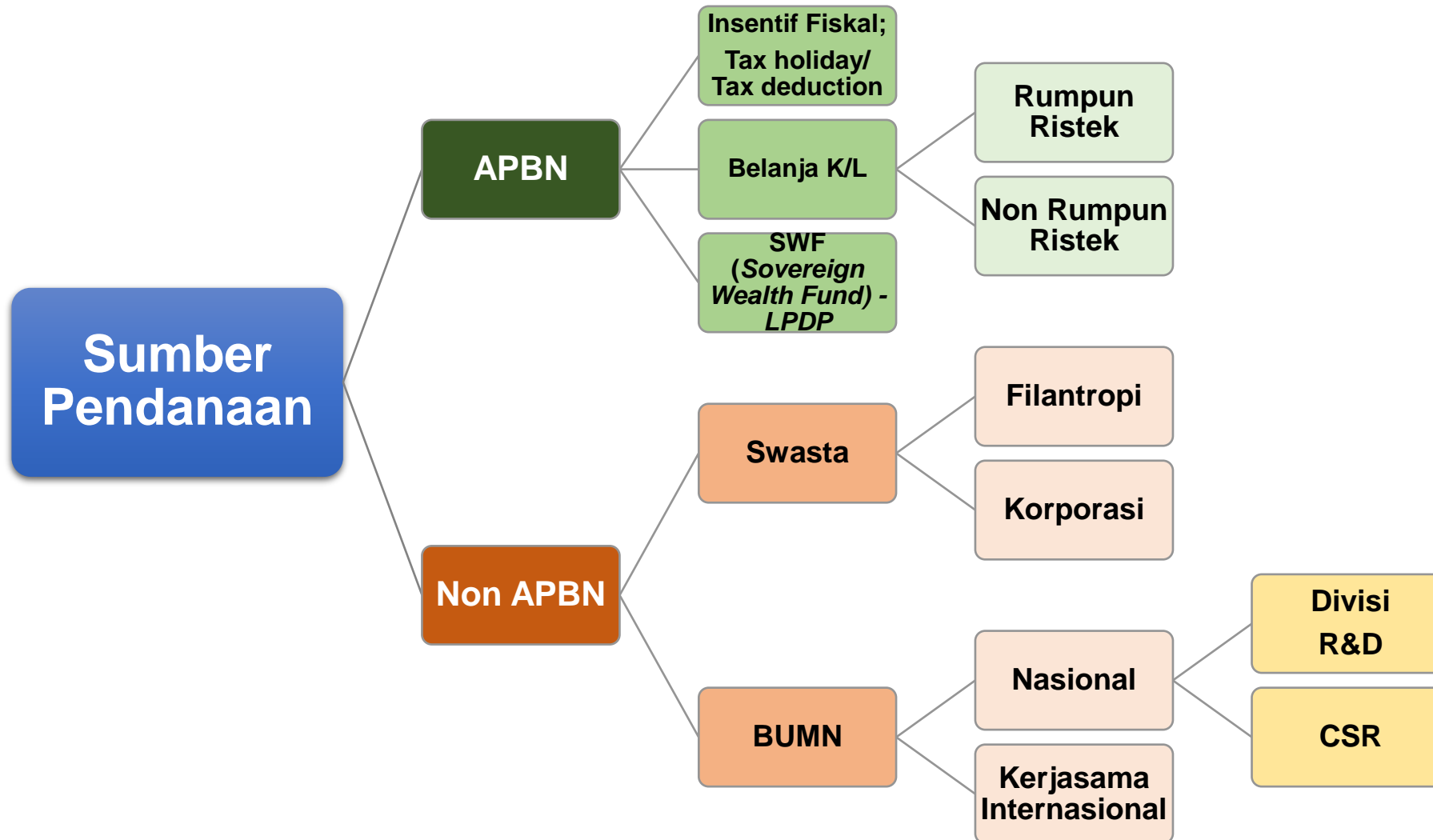


3

DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENELITIAN



Sumber Pendanaan Penelitian





DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENELITIAN

- 1. Insentif Pajak atas Badan Usaha**
- 2. Belanja Kementerian Lembaga**
- 3. Pembiayaan**



1. Insentif Pajak atas Badan Usaha

- ❖ PP Nomor 45 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
 - **Wajib Pajak Badan Dalam Negeri** yang **melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu** di Indonesia, dapat diberikan **pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300%** dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu
 - **Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu** merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk **menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi** bagi perkembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.



2. Belanja Kementerian Lembaga (1/3)

- ❖ Pengalokasian anggaran penelitian dalam APBN
- ❖ Penyederhanaan Penganggaran Penelitian melalui penetapan Standardisasi Biaya Penelitian (PMK No. 69/PMK.02/2018), sesuai usul/masukan Kemristekdikti
- ❖ Penyederhanaan laporan pertanggungjawaban litbang (PMK Nomor 203 tahun 2020)

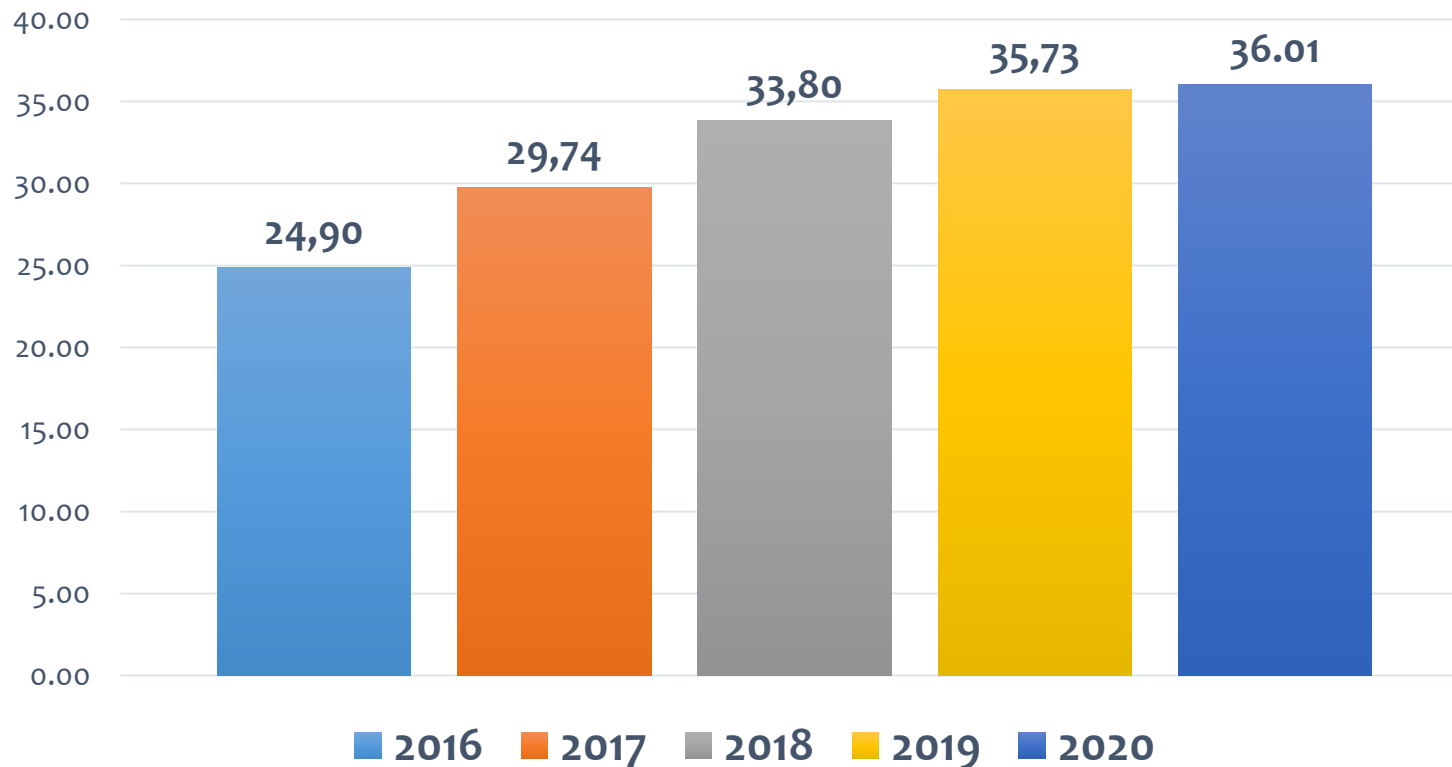


2. Belanja Kementerian Lembaga (2/3)

ALOKASI ANGGARAN LITBANG PEMERINTAH PUSAT

- ❖ Pengalokasian Anggaran Penelitian dalam APBN tersebar pada 52 Kementerian Lembaga

Anggaran Penelitian 2016 s.d 2020
(Triliun Rp)



Keterangan:

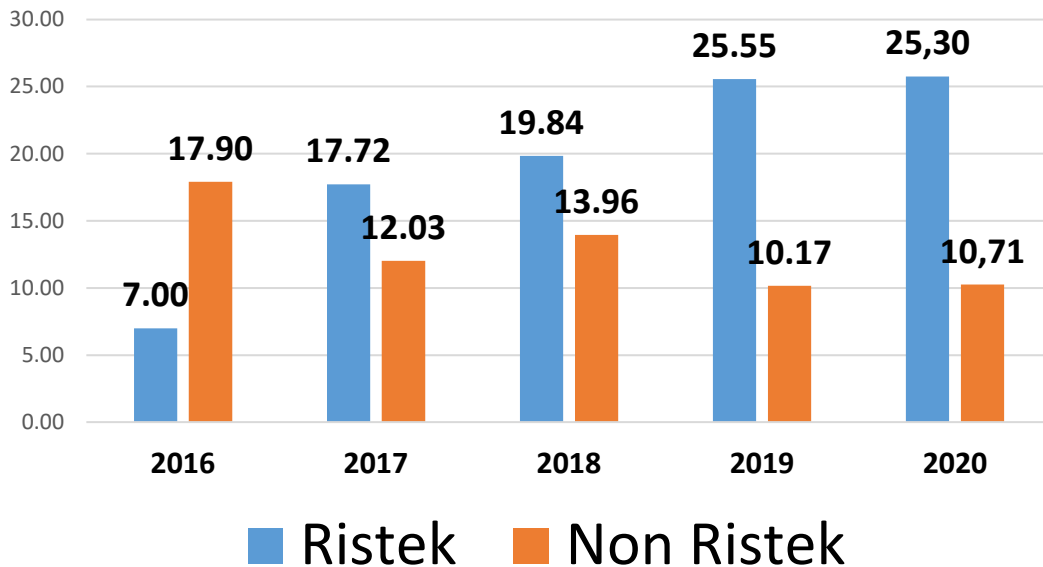
Angka diperoleh excersize Bersama LIPI dan
Pusdatin Kemristek serta DJA
Metode perhitungan dengan pendekatan
Frascati Manual
Angka 2021 masih dalam proses perhitungan
bersama



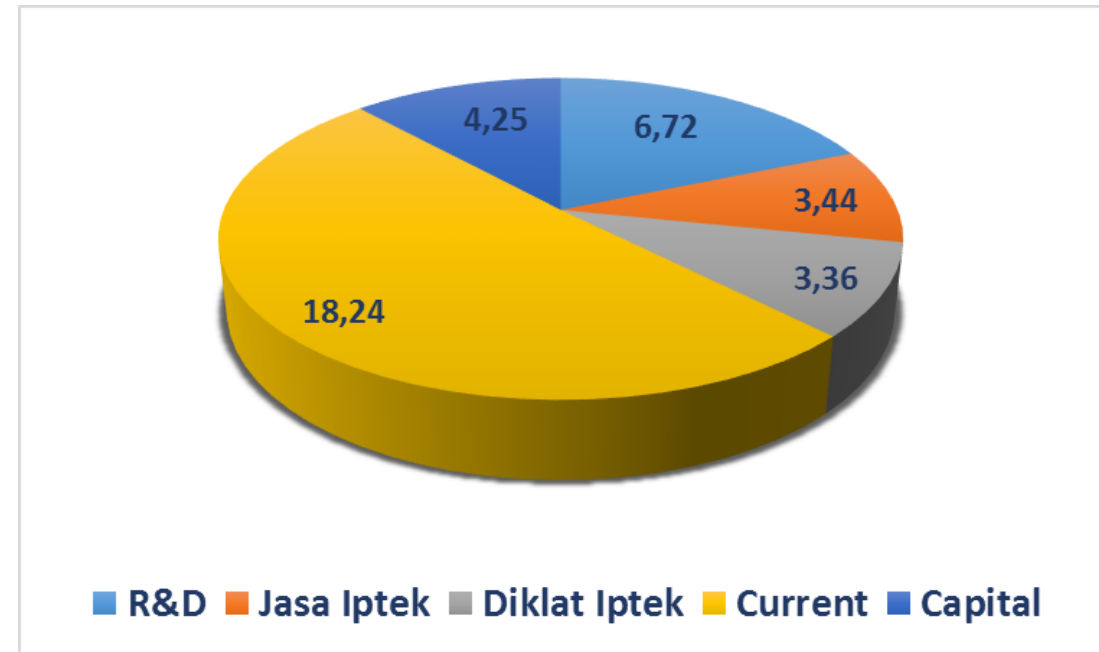
3. Belanja Kementerian Lembaga (3/3)

Anggaran Litbang Pemerintah Pusat Rumpun Ristek Non Ristek TA 2016 - 2020 (triliun Rp)

Angka bersifat estimasi



Anggaran Litbang Pemerintah Pusat TA 2020 Berdasarkan Klasifikasi



Keterangan:

Ristek adalah Kemristekdikti/Kemristek, Perguruan Tinggi, LIPI, LAPAN, BATAN, BAPETEN, BPPT, dan BSN

Non Ristek adalah Lembaga Penelitian dan Pengembangan K/L dan K/L yang melaksanakan kegiatan litbangjirap

*Rincian anggaran Ristek dan Non Ristek TA 2020 dihitung berdasarkan data Pagu Anggaran 2020.

Total : Rp36,01 T

Diklat Iptek adalah anggaran Scientific and Technical Education and Training

Jasa Iptek adalah anggaran Scientific and Technological Services

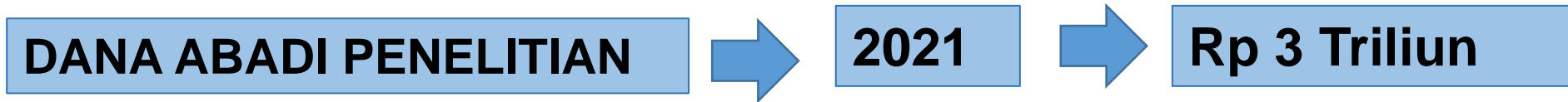
Current adalah anggaran Belanja Operasional termasuk gaji

Capital adalah Belanja Modal

R&D adalah kegiatan penelitian dan pengembangan (riset dan inovasi)



3. PEMBIAYAAN





4

TANTANGAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DI INDONESIA



TANTANGAN PENGEMBANGAN PENELITIAN

- ❖ Perlu penguatan kelembagaan yg kompeten dan kredibel dalam mensinergikan dan mengkonsolidasi riset nasional
- ❖ Penguatan sinergi penelitian dan inovasi antar PT, Lembaga Litbang K/L , LPNK, LSM dan industri dengan harapan penelitian dapat lebih terintegrasi



terjemahan dan kebijakan Perpres 38 Tahun 2018 Rencana Induk Riset Nasional 2017- 2045 sebagai acuan bersama terutama untuk Bidang Sosial Humaniora sudah diaturperlu pemantauan atas pelaksanaannya dan mengakomodir manakala adanya perubahan kebijakan

- ❖ Hilirisasi hasil litbangjirap perlu dioptimalkan sehingga banyak produk inovasi yang nantinya akan membentuk produk yang dikenal di pasar (rapid tes, GeNose, Gesit)
- ❖ Output dan outcome hasil penelitian belum optimal sejalan dengan dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah



Penelitian Sosial
Humaniora

Output : Rekomendasi kebijakan publik
Outcome : Perbaiki kebijakan

Perlu adanya prioritas penanganan masalah yang mendesak untuk diintervensi dengan kebijakan publik dalam jangka pendek dan menengah, evidence based riset

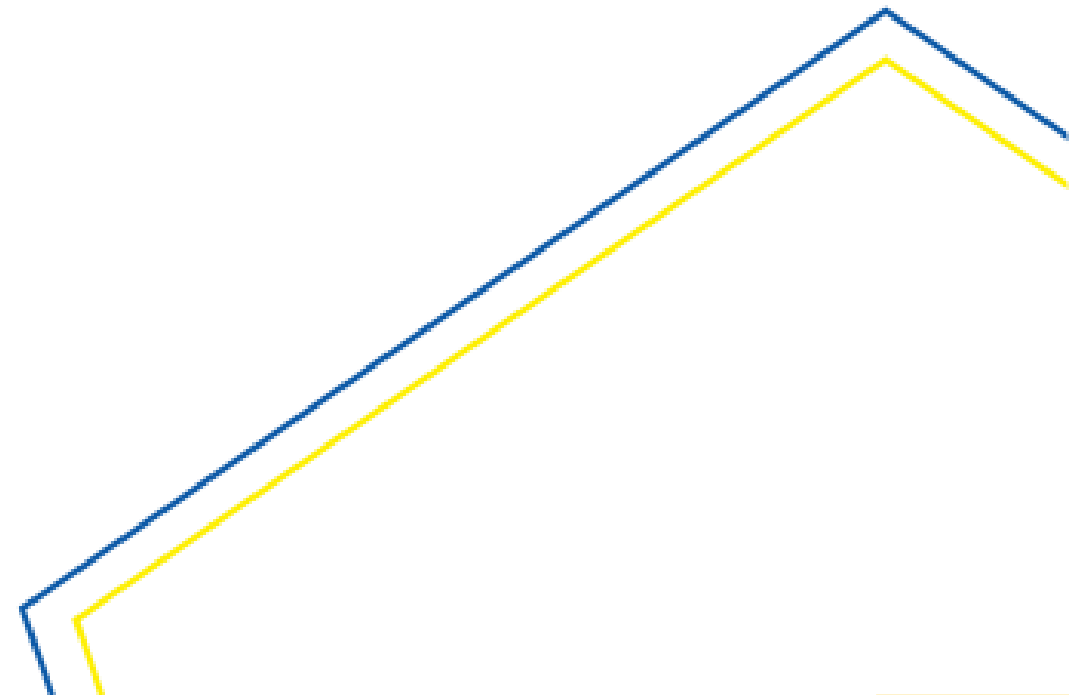


KESIMPULAN

- Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk mendukung pendanaan di bidang litbangjirap melalui pendanaan KL, pembiayaan dan insentif fiskal;
- Kemenkeu dalam posisi terbuka untuk mendapatkan masukan atas perbaikan tata kelola pelaksanaan penelitian maupun penganggaran penelitian.



LAMPIRAN





UNDANGAN KEGIATAN FGD (1/2)



Yth.:

Bapak Askolani, S.E., MA.
Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka memperingati 20 tahun perjalanannya, The SMERU Research Institute—dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI)—akan menyelenggarakan rangkaian diskusi untuk berbagi pengalaman dan memperluas dialog mengenai peranan *think tank* independen dan upaya yang diperlukan untuk membangun ekosistem yang kondusif bagi pengembangan *think tank* independen di bidang sosial-humaniora, khususnya sosial-ekonomi. Rangkaian diskusi tersebut terdiri atas empat kegiatan. Diskusi seri pertama telah dilaksanakan pada 28 Januari 2021 yang lalu.

Diskusi seri kedua akan dilakukan dengan kegiatan FGD dengan tema “**Menuju Ekosistem Riset yang Mendukung Pengembangan Lembaga Penelitian Sosial-Humaniora**”.

Berkenaan dengan hal ini, kami mohon kesediaan Bapak Askolani untuk menjadi **pembicara** pada sesi pengantar diskusi yang akan diadakan secara daring (*online*) pada:

Waktu : Selasa, 2 Maret 2021
Pukul : 09:00–12:00 WIB
Perangkat : Zoom (<http://bit.ly/FGD-LembagaPenelitian>)



UNDANGAN KEGIATAN FGD (2/2)

Adapun pengantar diskusi yang kami harapkan dari Bapak adalah **Dukungan Pendanaan untuk Peningkatan Kualitas Ekosistem Penelitian Sosial-Humaniora**, yang mencakup antara lain:

1. Ragam dukungan dan skema pendanaan yang disiapkan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan penelitian sosial-humaniora.
2. Tantangan pendanaan riset bidang sosial-humaniora dan strategi untuk mengatasinya
3. Peluang kolaborasi pendanaan untuk penelitian bidang sosial-humaniora, baik bagi lembaga penelitian pemerintahan maupun independen.

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No. 10A

Jakarta 10330 Indonesia

www.smeru.or.id

P +6221 - 3193 6336

F +6221 - 3193 0850

E mail smeru@smeru.or.id

Toward Pro-poor Policy through Research



TUJUAN KEGIATAN FGD

Dalam rangka memperingati 20 tahun perjalanannya, SMERU—dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI)—akan menyelenggarakan rangkaian diskusi untuk berbagi pengalaman dan memperluas dialog mengenai peranan *think tank* independen dan upaya yang diperlukan untuk membangun ekosistem yang kondusif bagi pengembangan *think tank* independen di bidang sosial-humaniora, khususnya sosial-ekonomi. Rangkaian diskusi tersebut terdiri atas empat kegiatan. Diskusi seri pertama telah dilakukan dalam bentuk *talk show* dan Peluncuran Buku “20 Tahun SMERU” pada 28 Januari 2021 yang lalu. Kegiatan lainnya adalah diskusi-diskusi terbatas dengan berbagai lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pemuda yang bergerak di bidang penelitian dan advokasi. Dari rangkaian diskusi ini, kami berharap akan dapat tersusun rekomendasi bagi pemerintah mengenai kebijakan yang diperlukan bagi penguatan dan pengembangan *think tank* independen, khususnya di bidang sosial-humaniora.

Diskusi seri kedua akan dilakukan dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) dengan tema **“Menuju Ekosistem Riset yang Mendukung Pengembangan Lembaga Penelitian Sosial-Humaniora”**. Tema ini dipilih karena pengembangan *think tank* independen di bidang sosial-humaniora, termasuk bidang sosial-ekonomi, merupakan aspek yang krusial dalam perkembangan demokrasi dan perumusan kebijakan yang lebih berkualitas, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tujuan Kegiatan

Acara FGD ini bertujuan memfasilitasi dialog multipihak untuk menelaah faktor pendorong dan penghambat serta strategi pembentukan ekosistem penelitian yang kondusif dalam rangka mendukung perkembangan lembaga penelitian di bidang sosial-humaniora. Perkembangan lembaga penelitian ini akan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti baik di tingkat nasional maupun daerah.



TERIMA KASIH

